



LAPORAN STATUS PEKERJAAN INDEPENDENT ADMINISTRATOR

KAP SUKRISNO SARWOKO & SANDJAJA



Plan vs Actual Schedule

No.	Instansi Pemerintah	Minggu ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Bulan	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER					
		Minggu ke	MEI	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV		
P1	Kick-off & Planning	Plan																						
		Actual																						
	Inception Report	Plan																						
		Actual																						
	Observation & Recommendation	Plan																						
		Actual																						
	Draft of Reporting Template	Plan																						
		Actual																						
	List of Analysis and Mitigation Plan	Plan																						
		Actual																						
	List of PIC	Plan																						
		Actual																						
P2	Submission of Reporting Template	Plan																						
		Actual																						
	List of Control Status	Plan																						
		Actual																						
	Workshop	Plan																						
		Actual				Minerba			Migas															
	Progress Meeting	Plan																						
		Actual																						
	Procedures and Approach	Plan																						
		Actual																						
	Preparation of Contextual Report	Plan																						
		Actual			Collecting & Analysis Macro Data																			
P3	Reconciliation Process	Plan																						
		Actual																						
P4	Investigation of Discrepancies	Plan																						
		Actual																						
P5	Submission Draft Report to Secretariat	Plan																						
		Actual																						
	Submission Draft Report to MSG	Plan																						
		Actual																						
	Final Contextual Report	Plan																						
		Actual																						
	Observation & Recommendation	Plan																						
		Actual																						
	Review on the Report	Plan																						
		Actual																						
	Final MSG Approval	Plan																						
		Actual																						

Daftar Isi

- 1 PROGRESS LAPORAN KONTEKSTUAL**
- 2 PROGRESS PENGUMPULAN PELAPORAN**
- 3 ISU-ISU REKONSILIASI**
- 4 TINDAK LANJUT**
- 5 HASIL SEMENTARA REKONSILIASI**

Laporan Kontekstual

Progress, pending data dan Isu

Laporan Kontekstual

Tujuan Presentasi

- Memahami struktur dari Laporan Kontekstual untuk memenuhi EITI Standard Requirement.
- Memahami mengetahui progress dari Laporan kontekstual beserta pending data dan isu yang ditemukan selama penulisan laporan kontekstual oleh Tim Pelaksana.
- Memberikan keputusan, saran dan arahan kepada Tim Independent Administrator dalam mempercepat penyelesaian penugasannya.

Standard EITI dalam presentasi ini hanya berbentuk ringkasan, pembaca sangat disarankan untuk membaca text EITI standard secara penuh dalam EITI standard yang dipublikasikan oleh EITI International.

Matrix daftar isi dan pending data/Isu

BAB	DAFTAR ISI	EITI STANDARD	Progress (Naratif)	Pending data/Isu
I	Ringkasan Eksekutif			
II	Latar Belakang			
III	Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia 3.1 Kerangka Hukum Pertambangan Migas dan Minerba 3.2 Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif 3.3 Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif 3.4 Reformasi yang Sedang Berjalan 3.4.1 Revisi UU Migas 3.4.2 Kebijakan satu peta dan <i>Minerba One Map Policies (MOMI)</i> 3.4.3 Modul Penerimaan Negara 3.4.4 Pelayanan terpadu satu pintu 3.4.5 Proses Clean and Clear di Sektor Pertambangan	3.2 description the legal framework governing the extractive industries includes reforms undertaking by government	95%	Pending data: tidak ada Isu: tidak ada Usulan: perubahan topik Tim Kecil : Termasuk peraturan pelaksana UU 4/2009 tentang minerba mengenai peraturan lelang di sektor minerba. Menjadi : Proses <i>Clear and Clean</i> di Sektor Pertambangan minerba Keputusan dan saran Tim Pelaksana:

Matrix daftar isi dan pending data/Isu

BAB	DAFTAR ISI	EITI STANDARD	Progress (Naratif)	Pending data/Isu
IV	Proses tender kontrak pertambangan migas dan perijinan pertambangan minerba 4.1 Proses dan mekanisme lisensing di pertambangan minyak dan gas Bumi 4.2 Proses dan mekanisme lisensing di pertambangan Minerba 4.3 Pengungkapan Kontrak 4.4 <i>Cadastral Information</i> 4.5 Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	3.9 Information on the licencing process and register 3.9.b maintain a publicly available register or cadastre system(s) 3.9.c include a reference or link in the EITI Report 3.10 Allocation of licenses 3.10.a information related to the award or <u>transfer</u> of licenses 3.10.b the list of applicants and the bid criteria. 3.10.c link to 3.10 a and 3.10.b if publicly available 3.10.d <u>MSG may wish to include additional</u> information including commentary efficiency and effectiveness of lincencing Process 3.11 Beneficial Owner 3.12 Contracts	70%	Pending data: EITI standard 3.10 - Ditjen Migas - Publikasi daftar perpindahan pemilik participating interest (saat ini tidak ada daftar yang tersedia di publik) - Ditjen Migas - tidak ada publikasi peserta tender Keputusan dan saran Tim Pelaksana: Isu: EITI standard 3.9 - Minerba: apakah MOMI akan dapat diakses oleh publik. Jika iya seberapa detail nantinya dapat diakses oleh publik. - Migas : informasi WK dan operator ada di Laporan SKK Migas, tapi tidak untuk koordinat dan produksi - Apakah peta WK (dan operator) dan WIUP seperti laporan EITI tahun lalu dapat kami dapatkan dari Ditjen Migas dan Ditjen Minerba Keputusan dan saran Tim Pelaksana:

Matrix daftar isi dan pending data/Isu

BAB	DAFTAR ISI	EITI STANDARD	Progress (Naratif)	Pending data/Isu
IV	Proses tender kontrak pertambangan migas dan perijinan pertambangan minerba 4.1 Proses dan mekanisme lisensing di pertambangan minyak dan gas Bumi 4.2 Proses dan mekanisme lisensing di pertambangan Minerba 4.3 Pengungkapan Kontrak 4.4 <i>Cadastral Information</i> 4.5 Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	3.9 Information on the licencing process and register 3.9.b maintain a publicly available register or cadastre system(s) 3.9.c include a reference or link in the EITI Report 3.10 Allocation of licenses 3.10.a information related to the award or <u>transfer</u> of licenses 3.10.b the list of applicants and the bid criteria. 3.10.c link to 3.10 a and 3.10.b if publicly available 3.10.d <u>MSG may wish to include additional</u> information including commentary efficiency and effectiveness of lincencing Process 3.11 Beneficial Owner 3.12 Contracts	70%	EITI standard 3.10.d EITI standard 3.11 EITI standard 3.12 Keputusan dan saran Tim Pelaksana:

Matrix daftar isi dan pending data/Isu

BAB	DRAFT DAFTAR ISI	EITI STANDARD	Progress (Naratif)	Pending data/Isu
V	Manajemen penerimaan negara dari industri ekstraktif	3.2 description fiscal regime governing the extractive industries	70%	Pending data: Kebijakan khusus lokal di Kabupaten Brojonegoro agar dibantu oleh CSO untuk peraturan terkait
	5.1 Penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif	3.7 Distribution of revenues from the extractive industries 3.7.a revenues record and not record in the national budget with links provided to relevant financial reports as applicable		Isu: EITI Standard 3.7.a IA belum bisa menunjukkan pencatatan dana Jaminan Reklamasi pada laporan keuangan Ditjen Minerba atau Pemerintah Daerah.
	5.2 Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Audit Realisasi APBN	3.8 further information on revenue management and expenditures 3.8.a revenues earmarked for specific programmes or geographic regions. 3.8.b country's budget and audit processes 3.8.c assumptions underpinning forthcoming years in the budget cycle and relating to projection		Apakah Tim Pelaksana mengetahui transaksi <i>extrabudgetary</i> yang lain selain ASR dan jaminan reklamasi
	5.3 Dana Bagi Hasil			Keputusan dan saran dari Tim Pelaksana:
	5.4 Sustainable Development (Rencana Strategis KESDM lima tahunan)			

Matrix daftar isi

BAB	DRAFT DAFTAR ISI	EITI STANDARD	Progress (Naratif)	Pending data/Isu
VI	Pengelolaan industri ekstraktif	3.3 Overview including exploration activities	60%	Pending data: EITI 3.3
	6.1 Konteks Global	3.4 information about the contribution of the extractive industries to the economy		Ditjen Minerba - Data proyek eksplorasi untuk PKP2B dan KK
	6.2 Industri Minyak dan Gas Bumi (Sumber daya dan cadangan, Lifting, Kontribusi terhadap perekonomian, Kegiatan eksplorasi)	3.4.a Size of the extractive industries, including an estimate of informal sector activity 3.4.b revenues generated by the extractive industries 3.4.c Exports 3.4.d Employment 3.4.e Key regions/areas where production is concentrated		EITI 3.4.a CSO - Kajian kontribusi informal dari World Bank dan Korsup KPK Contoh deskripsi sektor informal
	6.3 Industri Pertambangan Mineral dan Batubara (Sumber daya dan cadangan, Lifting, Kontribusi terhadap perekonomian, Kegiatan eksplorasi)	3.5 production data		EITI 3.5
	6.4 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan kerja	3.5.a Volume and value of production, <u>when relevant per areas</u>		- Ditjen Minerba - Data ekspor minerba per daerah kemudian per komoditas - Data produksi per daerah kemudian per komoditas - Data cadangan per daerah kemudian per komoditas
	6.5 Kegiatan Informal dalam Industri Ekstraktif	3.5.b Volume and value of export , <u>when relevant per areas</u>		- Ditjen Migas Data ekspor migas per daerah

Keputusan dan saran dari Tim Pelaksana?

Matrix daftar isi

BAB	DAFTAR ISI	EITI STANDARD	Progress (Naratif)	Pending data/Isu
VII	Badan usaha milik negara (BUMN) 7.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 7.2 PT Pertamina 7.3 PT Aneka Tambang 7.4 PT Bukit Asam 7.5 PT Timah	3.6 State participation 3.6.a prevailing rules and practices regarding the financial relationship between the government and SOEs 3.6.b quasi-fiscal expenditures 3.6.c level of beneficial ownership in mining, oil and gas of SOEs	40%	Pending data: - Follow up keterangan Pertamina mengenai peran Pertamina dalam penjualan minyak bagian Pemerintah - Follow up transaksi akuisisi atau divestasi sehubungan dengan EITI standard 3.6.c kepada keempat BUMN Jawaban dari Pertamina (Persero) Keputusan dan saran Tim Pelaksana:
VIII	Kesimpulan dan rekomendasi			

Laporan Kontekstual

3.10.d additional information including commentary efficiency and effectiveness of lincencing Process

Apakah Tim Pelaksana ingin mencatumkan komentar mengenai efisiensi dan efektifitas proses lincensing di Indonesia, misalnya: ada perbedaan antara prosedur yang ditetapkan dengan praktek, saran perbaikan agar proses tender bisa berlangsung lebih baik

Tabel 7 Jumlah penawaran WK pada tahun 2012 dan 2013

Periode Penawaran (jumlah WK)	Periode	WK Konvensional		WK Non-Konvensional	Total
		Lelang	Penawaran Langsung		
2012		12	30	9	51
2012 (Tahap I)	Maret 2012	5	14	-	19
<i>Jumlah pemenang</i>		<i>1</i>	<i>12</i>		<i>13</i>
2012 (Tahap II)	Oktober 2012	7	16		25
<i>Jumlah pemenang</i>		<i>2</i>	<i>14</i>		<i>16</i>
2012	Juni 2012			8	8
2012	Nopember			1	1
<i>Jumlah pemenang</i>				<i>5</i>	<i>5</i>
2013		2	16	2	20
2013 (Tahap I)	September 2013	2	16	-	18
<i>Jumlah pemenang</i>		<i>Tidak ada berita</i>	<i>5</i>		<i>5</i>
2013 (Tahap II)	Desember 2013	-	-	2	2
<i>Jumlah pemenang</i>				<i>1</i>	<i>1</i>

Laporan Kontekstual

3.11 Beneficial Ownership

3.11.a *recommended that implementing countries maintain a publicly available register of the beneficial owners*

3.11.b *Where such registers do not exist or are incomplete, it is recommended that implementing countries request companies to provide this information*

3.11.c *It is required that the government and/or SOE disclose their level of beneficial ownership*

Keputusan Tim Kecil : hanya membahas mengenai praktek dan sistem kesediaan data *beneficial ownership*

Saat ini peraturan pengungkapan beneficial owner atau yang mendekati telah diterapkan oleh dua regulator akan tetapi tidak spesifik untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri ekstraktif:

- Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk mengungkapkan pemegang saham utama atau pengendali dalam laporan tahunannya berdasarkan peraturan Bapepam Kep-431/BL/2012.
- Bagi perusahaan luar negeri dalam rangka memohon pengurangan pajak PPh 26 sesuai tax treaty → tidak untuk diakses oleh publik

Konfirmasi isi dalam laporan kontekstual dana apakah Tim Pelaksana mengetahui peraturan lainnya

Apakah ada komentar dari Tim Pelaksana yang dapat dimasukkan dalam laporan kontekstual, misalnya mengenai usaha ke depan dari Tim Pelaksana untuk mendorong pengungkapan *beneficial ownership*

Laporan Kontekstual

(3.9.b) Cadastre System (Koordinat) dan (3.12) Pengungkapan kontrak

2011

KIP memutuskan bahwa informasi kontrak bagi hasil yang dimohonkan, merupakan informasi terbuka sebagian

Pengecualian: informasi yang terkait lokasi atau informasi tempat seperti nama Desa, Kecamatan dan Kota

Pertimbangan:

- Peta area kontrak termasuk kategori data umum
- Kontrak tidak berkonsekuensi mengungkap kinerja atau kemampuan finansial
- Sepanjang tidak ada informasi privat

2013

- PN Jaksel membatalkan keputusan KIP
- Kontrak yang dimohonkan bukan informasi publik

Pertimbangan:

- Merupakan perjanjian bersifat privat (bersifat perdata dan rahasia bagi yang membuat kontrak)

2014

MA menolak permohonan kasasi KIP

2011

BP Migas mengajukan gugatan ke PN Jaksel

2013

KIP memohon kasasi

Komentar Tim Pelaksana mengenai:

- Kontrak yang spesifik antara dua entitas dan kategorinya sebagai informasi publik
- Apakah koordinat termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan dalam UU 17/2008 (pasal 17) jika mengacu pada keputusan KIP

Laporan Kontekstual

3.4 contribution of the extractive industries to the economy

3.4.a size of extractive industries (absolute and % of GDP) including informal activities

Contoh gambaran produksi yang tidak tercatat dari Focus Group APBI

Konsumsi (BPS)		Produksi (ESDM)		Potensi produksi tidak terverifikasi 56.3 juta ton atau Potensi kehilangan penerimaan negara (royalti, Pph, PPN) US\$85-120 per ton – FG APBI
Ekspor	384.4	PKP2B	261.4	
Konsumsi Domestik	67.5	IUP	134.2	
TOTAL		TOTAL		
451.9		395.6		

Proyeksi diatas hanya merupakan contoh

Saran dan arahan Tim Pelaksana mengenai gambaran kontribusi informal



Laporan Kontekstual

Peranan Pertamina untuk menjual minyak dan gas bumi bagian Pemerintah

- Desember 2002
 - BPMIGAS menunjuk PERTAMINA sebagai penjual gas bumi bagian Negara (SK Kepala BP MIGAS No. KPTS-2753/BP00000/2002-S0 tentang kontrak berjalan).
 - BPMIGAS menunjuk PERTAMINA sebagai penjual gas bumi bagian Negara dari daerah Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Unocal, VICO, dan TotalFinaElf (Pemasok Gas Bumi) untuk keperluan Pabrik Pupuk Kaltim-4 (SK Kepala BP MIGAS No. KPTS-103/BP00000/2003-S0)
- Desember 2003
 - BPMIGAS menunjuk PERTAMINA sebagai penjual gas bumi bagian Negara yang berasal dari beberapa Wilayah Kerja di daerah Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Unocal, Vico, dan Total untuk keperluan PKT-2 (SK Kepala BP Migas Kepala BPMigas No. KPTS-103/BP00000/2003-S0)
 - BPMIGAS telah menunjuk Pertamina sebagai penjual LNG bagian Negara yang diproduksi dari kilang LNG Badak dan Kilang LNG Tangguh untuk pasar Jepang (SK Kepala BPMIGAS No. Kpts-031/BP00000/2003-S0)

• Oktober 2012

BPMIGAS menunjuk PERTAMINA sebagai penjual minyak mentah/kondensat bagian Negara untuk kebutuhan pasokan kilang dalam negeri (SK Kepala BP Migas KEP-0131/BPO0000/2012/S2)

FEE : Kepmen ESDM No. 2576 K/12/MEM/2012 tentang Formula dan Besaran Imbalan (Fee) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi Untuk PT Pertamina (Persero).

Pembayaran : Cash Settlement terdapat di catatan laporan arus kas pertamina (“Pembayaran Kas kepada Pemerintah”)

Pinjaman : Pinjaman ke Pihak Ketiga merupakan business to business tidak memakai jaminan pemerintah

Tanggapan dari Tim Pelaksana

Tanggapan dari Pertamina ini belum kami validasi lebih lanjut karena baru kami terima tanggal 10 Agustus 2015

Progress

Pengumpulan Format Pelaporan

Entitas Pelapor Sektor Migas

Instansi Pemerintah :

- SKK Migas, Kementerian ESDM
- Ditjen Migas, Kementerian ESDM
- Dit PNBP, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
- Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Riau

Kontraktor Migas :

- *Operator* adalah pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest* lainnya yang menjalankan kegiatan operasi Migas.
- *Non Operator* adalah pemegang *participating interest* yang tidak menjalankan kegiatan operasi Migas.
- *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.

Status/Progress Migas - s/d 07/08/2015

- Entitas pemerintah

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	7	1	6	14%
7 Agustus 2015	7	4	3	57%

- Operator KKKS

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	72	47	25	65%
7 Agustus 2015	72	54	18	75%

- Non operator KKKS

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	
15 Juli 2015	100	32	76	32%
7 Agustus 2015	100	64	36	64%

18 Operator yang Belum Melapor terdiri dari:

1. PHE → 9 perusahaan
2. JOB → 4 perusahaan (East Java, Salawati, Tomori, Gebang)
3. PSC → 5 perusahaan (VICO, VICO CBM, Kangean, Lapindo, MontD'or)

3 instansi Pemerintah yang Belum Melapor terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur
3. Pemerintah Daerah Propinsi Riau

Entitas Pelapor Sektor Minerba

Instansi Pemerintah :

- Ditjen Minerba, Kementerian ESDM
- Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan
- Dit PNB, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
- Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Riau

Perusahaan Minerba :

- Perusahaan Batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP-Batubara yang membayar royalty >25 M di tahun 2012 & 2013.
- Perusahaan Mineral pemegang kontrak KK-Mineral dan IUP-Mineral yang membayar royalty >25 M di tahun 2012 & 2013.

Status/Progress Minerba - s/d 07/08/2015

- Entitas pemerintah

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	7	-	7	0%
7 Agustus 2015	7	2	5	29%

- Entitas perusahaan

Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
15 Juli 2015	109	26	83	24%
7 Agustus 2015	109	52	57	48%

Lembar Otorisasi Pajak

Status (per 07 Agustus 2015)	Jumlah	Tindak Lanjut
Sudah menyerahkan otorisasi pajak asli lengkap beserta akta	38	
Lembar otorisasi pajak tidak dilengkapi dengan akta perusahaan	4	Follow up ke perusahaan: 1. PT Bangun Banua Persada Kalimantan 2. PT Anugrah Harisma Barakah 3. PT Ifishdeco 4. PT Tanjung Alam Jaya
Sudah lapor namun belum menyerahkan lembar otorisasi	10	Follow up ke perusahaan: 1. PT Adimitra Baratama Nusantara 2. PT Lembuswana Perkasa 3. Pesona Khatulistiwa Nusantara 4. PT Pipit Mutuara Jaya 5. PT Santan Batubara 6. PT Tambang Damai 7. PT Tambang Timah 8. PT Timah (Tbk) 9. PT Tunas Inti Abadi 10. PT Yiwon Mining
TOTAL	52	

Entitas Pelapor Sektor Minerba - s/d 07/08/2015

57 Perusahaan yang Belum Melapor terdiri dari:

1. PKP2B → 15 perusahaan
2. IUP-Batubara → 28 perusahaan
3. KK-Mineral → 1 perusahaan
3. IUP-Mineral → 13 perusahaan

5 Instansi Pemerintah yang Belum Melapor terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur
3. Pemerintah Daerah Propinsi Riau
4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (IA diminta untuk mengkompilasi data Royalti dan PHT ke Ditjen Minerba sesuai kebutuhan data yang diperlukan (109 perusahaan))
5. Direktorat Jenderal Pajak (Data pajak sebanyak 28 perusahaan sesuai lembar otorisasi yang telah diserahkan, sebanyak 27 perusahaan datanya telah siap tetapi DJP tidak dapat memberikan data tersebut, karena surat permintaan data dari Deputi Kemenko ke DJP belum diterima oleh Direktorat PKP.
Untuk selanjutnya saran dari DJP surat permintaan data pajak ke DJP ditujukan secara langsung ke Direktorat PKP)

ISU-ISU REKONSILIASI

Cakupan Rekonsiliasi

Sektor Migas

- Penambahan perusahaan non operator dari 97 menjadi 100 perusahaan karena ada penambahan 10 dan pengurangan 7 perusahaan disebabkan karena
 - Penjualan perusahaan (berganti pemilik)
 - Berganti nama
- Non operator pembeli belum/tidak mau melaporkan pajak yang disetor Non operator yang lama (pemilik lama)
- Kesalahan penulisan satuan
- Konversi LPG dan LNG

Sektor Minerba

1. Proses rekonsiliasi belum dilakukan, karena data dari Ditjen Minerba dan Ditjen Pajak, belum diterima. Hari ini Ditjen Minerba mengundang IA untuk melakukan rekonsiliasi.
2. Transportation fee PT Bukit Asam ke PT KAI melebihi 1% dari penerimaan sektor minerba.
3. Perusahaan Minerba yang sudah tidak aktif atau likuidasi (slide berikut)

Isu-isu Rekonsiliasi

No	Perusahaan	Kontrak	Status
1.	PT Anugerah Bara Kaltim (Kaltim)	-	Tidak memiliki IUP (sebagai mining operator PT Multi Sarana Avindo dan PT Welarco Subur Jaya)
2.	PT Gema Rahmi Persada (Kaltim)	IUP-BB	Perusahaan tidak beroperasi lagi sejak tahun 2014
3.	Unit Desa Makmur (Kalsel)	IUP-BB	Informasi nomor telpon/CP belum diperoleh
4.	PT Tujuh SW (Babel)	IUP-M	Perusahaan menyatakan likuidasi
5.	PT Gunung Sion (Kepri)	IUP-M	Perusahaan tidak beroperasi lagi sejak Februari 2014
6.	PT Telaga Bintan Jaya (Kepri)	IUP-M	Perusahaan tidak beroperasi lagi sejak akhir tahun 2014
7.	PT Citra Silika Mallawa (Sultra)	IUP -M	Informasi dari CSO perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi
8.	PT Fajar Mentaya Abadi (Kalteng)	IUP-M	Perusahaan tidak beroperasi lagi sejak tahun 2014

Isu-isu Rekonsiliasi

Beberapa perusahaan enggan untuk memberikan laporan (karena tidak ada sanksi) terutama perusahaan Minerba. IA dan Sekretariat EITI masih berusaha melakukan pendekatan.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain:

- PT Telen Orbit Prima
- PT Antang Gunung Meratus
- PT Stargate Pacific Resources
- PT Kayan Putra Utama Coal
- PT Energy Cahaya Industritama
- PT Sebuk Iron Lateritic Ores
- PT Indoasia Cemerlang
- PT Riau Baraharum

**TINDAK
LANJUT**

Langkah-langkah Tindak Lanjut

- **Persetujuan Tim Pelaksana**

1. Perubahan cakupan rekonsiliasi perusahaan migas non operator karena perubahan kepemilikan
2. Perubahan cakupan rekonsiliasi perusahaan minerba untuk perusahaan yang tidak aktif

- **Melanjutkan proses rekonsiliasi dengan melakukan konfirmasi pada entitas pelapor**

- **Melakukan analisa pada data yang masuk karena ada perbedaan**

- **Menghubungi Dinas Pertambangan – Pemerintah Daerah untuk mengkonfirmasi perusahaan yang tidak aktif/likuidasi**

Hasil sementara rekonsiliasi SEKTOR MIGAS

Per 7 Agustus 2015

Preliminary Data Rekonsiliasi 2012 - Table 1 (1/3)

Dalam ribuan US\$	KKKS	PNBP/DJA	Perbedaan Awal	KKKS	PNBP/DJA	Perbedaan Post-Rekon
PAJAK						
PPh Migas-Operator	6.556.135	6.371.201	(184.934)	6.556.135	6.371.201	(184.934)
PPh Migas-Non operator	1.495.598	1.894.747	399.149	1.495.598	1.894.747	399.149
BUKAN PAJAK						
Production Bonus	3.000	3.750	750	3.000	3.750	750

Preliminary Data Rekonsiliasi 2012 - Table 1 (2/3)

Dalam ribuan US\$	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Total lifting Minyak	32.543.115	35.305.657	2.762.542	32.610.949	35.305.657	2.694.708
Total lifting Gas	23.699.495	26.942.080	3.242.585	23.744.469	26.942.080	3.197.611
Domestic Market Obligation Fee	1.358.524	1.430.886	72.362		1.430.886	
Over/Under lifting Oil	371.958	273.351	(98.608)	354.040	273.351	(80.689)
Over/Under lifting Gas	263.166	164.547	(98.619)	263.872	164.547	(99.325)

Volume	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Government lifting Minyak (barell)	170.924.298	179.727.474	8.803.176	170.969.745	179.727.475	8.757.730
Government lifting Gas (mscf)	496.994.420	593.216.099	96.221.679	509.602.847	593.216.099	83.613.252
Domestic Market Obligation (barell)	24.475.711	25.712.562	1.236.851	24.473.711	25.712.562	1.238.851

Preliminary Data Rekonsiliasi 2012 - Table 1 (3/3)

	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Total lifting Oil (barel)	301.975.107	314.305.909	12.330.802	302.062.144	314.305.909	12.243.765
Total lifting Gas (MSCF)	1.821.499.416	2.389.212.121	567.712.705	1.896.672.257	2.389.212.121	492.539.864
Signature Bonus untuk perpanjangan kontrak (000US\$)	-	-	-	-	-	-

Preliminary Data Rekonsiliasi 2012 - Table 2

Dalam ribuan US\$	SKK Migas	PNBP/DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	PNBP/DJA	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Government lifting Oil						
- Ekspor	2.356.591	2.380.856	24.265	2.356.591	2.380.856	24.265
- Domestik	17.862.466	17.861.699	(767)	17.862.466		
Government lifting Gas						
- Ekspor	5.250.775	7.608.781	(24.734)	5.250.775	7.608.781	(24.734)
- Domestik	2.382.740			2.382.740		

Preliminary Data Rekonsiliasi 2013 - Table 1 (1/3)

Dalam ribuan US\$	KKKS	PNBP/DJA	Perbedaan Awal	KKKS	PNBP/DJA	Perbedaan Post-Rekon
PAJAK						
PPh Migas-Operator	5.711.211	5.572.801	(138.410)	5.711.211	5.572.801	(138.410)
PPh Migas-Non operator	1.468.123	.1.999.729	531.606	1.468.123	.1.999.729	531.606
BUKAN PAJAK						
Production Bonus	26.500	26.500	-	26.500	26.500	-

Preliminary Data Rekonsiliasi 2013 - Table 1 (2/3)

Dalam ribuan US\$	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Total lifting Minyak	28.759.896	31.333.440	2.753.454	28.759.896	31.333.440	2.753.454
Total lifting Gas	22.549.410	26.246.332	3.696.922	22.549.410	26.246.332	3.696.922
Domestic Market Obligation Fee	1.172.314	1.224.644	52.330	1.172.314	1.224.644	52.330
Over/Under lifting Oil	386.274	220.235	(166.039)	386.274	220.235	(166.039)
Over/Under lifting Gas	(134.217)	(3.991)	130.226	(134.217)	(3.991)	130.226

Volume	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Government lifting Minyak (barell)	156.021.350	161.438.452	5.417.102	156.059.104	161.438.452	5.379.348
Government lifting Gas (mscf)	984.766.646	610.286.226	(374.480.420)	512.041.596	610.286.226	98.244.630
Domestic Market Obligation (barell)	23.628.652	24.519.779	891.127	23.628.652	24.519.779	891.127

Preliminary Data Rekonsiliasi 2013 - Table 1 (3/3)

	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Total lifting Oil (barel)	286.651.750	298.432.031	11.780.281	286.718.507	298.432.031	11.713.524
Total lifting Gas (MSCF)	8.360.174.180	2.357.703.960	(6.002.470.220)	1.842.465.051	2.357.703.960	515.238.909
Signature Bonus untuk perpanjangan kontrak (000US\$)	200	-	(200)	200	-	(200)

Preliminary Data Rekonsiliasi 2013 - Table 2

Dalam ribuan US\$	SKK Migas	PNBP/DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	PNBP/DJA	Perbedaan Post-Rekon
BUKAN PAJAK						
Government lifting - Oil						
- Ekspor	2.118.619	2.108.631	(9.988)	2.118.619	2.108.631	(9.988)
- Domestik	14.897.420	14.892.249	(5.171)	14.897.420	14.892.249	(5.171)
Government liftin - Gas						
- Ekspor	4.822.284	7.423.089	-	4.822.284	7.423.089	-
- Domestik	2.600.805			2.600.805		

Preliminary Data Yang Tidak Direkonsiliasi 2012 & 2013

	2012	2013
Community Development / CSR (US\$):		
1. Hubungan Masyarakat	3.254.296	4.516.648
2. Pemberdayaan Masyarakat	1.495.930	1.454.255
3. Pelayanan Masyarakat	394.685	221.744
4. Infrastruktur	1.984.945	2.085.999
5. Lingkungan	251.749	301.250
Pajak Pertambahan Nilai (juta Rp)	6.885.489	9.318.015
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rp)	45.980	97.814
Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rp)	13.501.209	20.716.006

Hasil sementara rekonsiliasi SEKTOR MINERBA

Per 7 Agustus 2015

Preliminary Data Rekonsiliasi 2012

- Royalti

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Post-Rekon
PKP2B	Rupiah	151.832	-	(151.832)	151.832	-	(151.832)
	USD	303.040	-	(303.040)	303.040	-	(303.040)
IUP-Batubara	Rupiah	721.435	-	(721.435)	721.435	-	(721.435)
	USD	75.612	-	(75.612)	75.612	-	(75.612)
KK-Mineral	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	USD	90.448	-	(90.448)	90.448	-	(90.448)
IUP-Mineral	Rupiah	132.136	-	(132.136)	132.136	-	(132.136)
	USD	18.291	-	(18.291)	18.291	-	(18.291)
TOTAL	Rupiah	1.005.403	-	(1.005.403)	1.005.403	-	(1.005.403)
	USD	487.391	-	(487.391)	487.391	-	(487.391)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

- Penjualan Hasil Tambang

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Post-Rekon
PKP2B	Rupiah	261.141	-	(261.141)	261.141	-	(261.141)
	USD	466.945	-	(466.945)	466.945	-	(466.945)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Preliminary Data Rekonsiliasi 2012

- Pajak Penghasilan Badan

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Post-Rekon
PKP2B	Rupiah	1.532.991	-	(1.532.991)	1.532.991	-	(1.532.991)
	USD	759.735	-	(759.735)	759.735	-	(759.735)
IUP-Batubara	Rupiah	1.864.364	-	(1.864.364)	1.864.364	-	(1.864.364)
	USD	22.354	-	(22. 354)	22. 354	-	(22. 354)
KK-Mineral	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	USD	995.288	-	(995.288)	995.288	-	(995.288)
IUP-Mineral	Rupiah	644.703	-	(644.703)	644.703	-	(644.703)
	USD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Rupiah	4.042.059	-	(4.042.059)	4.042.059	-	(4.042.059)
	USD	1.777.378	-	(1.777.378)	1.777.378	-	(1.777.378)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Preliminary Data Rekonsiliasi 2012

- Dividen

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Anggaran	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Anggaran	Perbedaan Post-Rekon
Freeport Indonesia	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	USD	-	-	-	-	-	-
Bukit Asam	Rupiah	1.049.380	-	(1.049.380)	1.049.380	-	(1.049.380)
	USD	-	-	-	-	-	-
Aneka Tambang	Rupiah	564.138	-	(564.138)	564.138	-	(564.138)
	USD	-	-	-	-	-	-
Timah	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	USD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Rupiah	1.613.518	-	(1.613.518)	1.613.518	-	(1.613.518)
	USD	-	-	-	-	-	-

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Preliminary Data Rekonsiliasi 2013

- Royalti

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Post-Rekon
PKP2B	Rupiah	246.191	-	(246.191)	246.191	-	(246.191)
	USD	505.179	-	(505.179)	505.179	-	(505.179)
IUP-Batubara	Rupiah	620.956	-	(620.956)	620.956	-	(620.956)
	USD	44.580	-	(44.580)	44.580	-	(44.580)
KK-Mineral	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	USD	116.738	-	(116.738)	116.738	-	(116.738)
IUP-Mineral	Rupiah	66.288	-	(66.288)	66.288	-	(66.288)
	USD	56.762	-	(56.762)	56.762	-	(56.762)
TOTAL	Rupiah	905.739	-	(905.739)	905.739	-	(905.739)
	USD	723.258	-	(723.258)	723.258	-	(723.258)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

- Penjualan Hasil Tambang

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Minerba	Perbedaan Post-Rekon
PKP2B	Rupiah	420.508	-	(420.508)	420.508	-	(420.508)
	USD	499.107	-	(499.107)	499.107	-	(499.107)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Preliminary Data Rekonsiliasi 2013

- Pajak Penghasilan Badan

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Pajak	Perbedaan Post-Rekon
PKP2B	Rupiah	739.303	-	(739.303)	739.303	-	(739.303)
	USD	352.682	-	(352.682)	352.682	-	(352.682)
IUP-Batubara	Rupiah	829.772	-	(829.772)	829.772	-	(829.772)
	USD	36.636	-	(36.636)	36.636	-	(36.636)
KK-Mineral	Rupiah	901.349	-	(901.349)	901.349	-	(901.349)
	USD	459.111	-	(459.111)	459.111	-	(459.111)
IUP-Mineral	Rupiah	495.091	-	(495.091)	495.091	-	(495.091)
	USD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Rupiah	2.965.515	-	(2.965.515)	2.965.515	-	(2.965.515)
	USD	848.429	-	(848.429)	848.429	-	(848.429)

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Preliminary Data Rekonsiliasi 2013

- Dividen

Kontrak	Mata uang	Perusahaan	Ditjen Anggaran	Perbedaan Awal	Perusahaan	Ditjen Anggaran	Perbedaan Post-Rekon
Freeport Indonesia	Rupiah	-	-	-	-	-	-
	USD	-	-	-	-	-	-
Bukit Asam	Rupiah	1.079.747	1.079.747	-	1.079.747	1.079.747	-
	USD	-	-	-	-	-	-
Aneka Tambang	Rupiah	291.948	291.948	-	291.948	291.948	-
	USD	-	-	-	-	-	-
Timah	Rupiah	-	140.262	140.262	-	140.262	140.262
	USD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Rupiah	1.371.695	1.511.957	140.262	1.371.695	1.511.957	140.262
	USD	-	-	-	-	-	-

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Preliminary Data Yang Tidak Direkonsiliasi 2012 & 2013

Item Pelaporan	2012		2013	
	Rupiah	USD	Rupiah	USD
Iuran Tetap	19.910	2.017	20.570	2.650
Pajak Bumi dan Bangunan	260.757	-	193.799	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	257.430	8.752	345.333	7.803
Pembayaran Langsung ke Pemda	700.798	4.803	356.006	4.830
CSR:				
1. Hubungan masyarakat	39.758	1.377	36.161	1.582
2. Pemberdayaan masyarakat	221.284	128.445	131.601	102.681
3. Pelayanan masyarakat	4.414	1.685	5.571	1.008
4. Infrastruktur	61.522	11.645	58.419	6.699
5. Lingkungan	346	194	359	184
Penyediaan Infrastruktur	7.277	-	38.758	-
Transportasi Fee	1.787.599	374	1.818.587	369
Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	257.986	-	246.679	-

Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Preliminary Data Yang Tidak Direkonsiliasi 2012 & 2013

- Domestic Market Obligation (DMO)

Kontrak	2012	2013
PKP2B	21.612.368	21.917.761
IUP-Batubara	2.510.224	324.502

- Data Produksi dan Penjualan

Kontrak	2012				2013			
	Volume (ton)		Nilai Penjualan*		Volume (ton)		Nilai Penjualan*	
	Produksi	Penjualan	Rupiah	USD	Produksi	Penjualan	Rupiah	USD
PKP2B	121.337.531	119.591.061	8.791.015	8.424.028	135.986.923	134.976.106	9.144.685	8.182.403
IUP-BB	22.504.953	23.048.344	6.019.334	1.079.598	25.444.272	25.848.383	4.588.678	1.109.998
KK-Min	588.229.020	554.201.737	-	5.498.353	929.358.484	809.360.734	-	5.836.730
IUP-Min	21.800.261	19.892.168	1.152.288	279.822	26.940.255	24.100.077	1.314.472	352.919
TOTAL	753.371.765	716.733.309	15.962.637	15.821.801	1.117.729.933	994.285.300	15.047.835	15.482.051

(*) Disajikan dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD